

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN GENDER DI PROVINSI LAMPUNG: ANALISIS IPM, IPG DAN IDG

Handi Mulyaningsih

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, No.1, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Korespondensi: handi.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id

Recieved: 07/03/2026 | Revised: 15/06/2026 | Accepted: 20/06/2026

Abstract

Human development is measured not only by improvements in the community's quality of life but also by the achievement of gender equality regarding access, opportunities, and empowerment. This study aims to analyses the trends in the Human Development Index (HDI), Gender Development Index (GDI), and Gender Empowerment Measure (GEM) in Lampung Province, and to identify the gap between human development outcomes and gender empowerment levels. A descriptive quantitative approach was employed, utilizing secondary data from Statistics Indonesia (BPS), the United Nations Development Programme (UNDP), the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA), and other relevant government publications. Data analysis utilized a descriptive-comparative method, contrasting Lampung Province's HDI, GDI, and GEM trends with national figures. The results indicate that Lampung Province's HDI has steadily risen, reaching 73.13 in 2024, although it remains below the national average. Meanwhile, a GDI of 91.33 in 2023 suggests that gender disparities in access to education, health, and a decent standard of living are relatively low. However, a GEM score of only 67.71 indicates that women's empowerment—particularly in the political, economic, and decision-making spheres—lags behind basic development achievements. The disparity between the high GDI and low GEM scores reveals that equal access has not yet been fully matched by equal participation in and control over development resources. Therefore, it is essential to strengthen gender-responsive development policies by optimizing gender-responsive budgeting, increasing women's representation in decision-making, and expanding women's access to economic opportunities to achieve inclusive, gender-equitable, and sustainable development.

Keywords: *human development, HDI, GDI, GEM*

Abstrak

Pembangunan manusia tidak hanya diukur melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga melalui terciptanya kesetaraan gender dalam memperoleh akses, kesempatan, dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Lampung serta mengidentifikasi kesenjangan antara capaian pembangunan manusia dan pemberdayaan gender. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), United Nations Development Programme (UNDP), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta berbagai publikasi pemerintah terkait. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif melalui perbandingan perkembangan IPM, IPG, dan IDG Provinsi Lampung dengan capaian nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM Provinsi Lampung terus meningkat hingga mencapai 73,13 pada tahun 2024, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, IPG sebesar 91,33 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak relatif rendah. Namun, nilai IDG yang hanya mencapai 67,71 mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan, masih tertinggal dibandingkan capaian pembangunan dasar. Kesenjangan antara tingginya IPG dan rendahnya IDG menunjukkan bahwa kesetaraan akses belum sepenuhnya diikuti oleh kesetaraan dalam partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembangunan yang responsif gender melalui optimalisasi Anggaran Responsif Gender, peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta perluasan perempuan terhadap kesempatan ekonomi guna mewujudkan yang inklusif, berkeadilan gender, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *pembangunan manusia, IPM, IPG, IDG*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Salah satu ukuran yang umum digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian pembangunan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Selain itu, untuk melihat dimensi kesetaraan gender, digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG menggambarkan kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan IDG menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan, termasuk di ranah politik.

Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan manusia. IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 mencapai 73,13 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Sementara itu, IPG Provinsi Lampung pada tahun 2023 tercatat sebesar 91,33 yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan relatif tidak terlalu besar. Namun demikian, nilai IPG yang belum mencapai 100 tetap mengindikasikan masih adanya ketimpangan gender dalam beberapa aspek pembangunan.

Berbeda dengan IPM dan IPG, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan capaian yang lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perempuan telah memiliki akses yang relatif setara dalam bidang pendidikan dan kesehatan, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan politik masih terbatas. Rendahnya IDG mencerminkan bahwa perempuan belum sepenuhnya memiliki posisi strategis dalam lembaga legislatif, jabatan publik, maupun sektor ekonomi.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata Indonesia. Sementara itu, IPG Lampung relatif sejalan dengan angka nasional, yang menunjukkan bahwa kesenjangan akses dasar antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Namun, IDG Lampung masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik dan ekonomi masih menjadi tantangan utama.

Kesenjangan antara meningkatnya IPM dan IPG dengan rendahnya IDG menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses pembangunan gender di Provinsi Lampung. Artinya, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan keterlibatan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal dalam akses pembangunan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesetaraan substantif dalam hal kekuasaan dan representasi.

Selain faktor capaian indikator pembangunan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh berbagai hambatan struktural dan kultural. Secara struktural, keterbatasan akses perempuan terhadap posisi strategis dalam politik dan ekonomi masih dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen dan sistem kelembagaan yang belum sepenuhnya inklusif. Secara kultural, nilai-nilai patriarki dan stereotip gender masih memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kapasitas perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Pembangunan manusia merupakan pendekatan untuk mengukur keberhasilan, sebagai kritik atas pembangunan yang menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi. United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subyek dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai obyek pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2023). Untuk mengukur kualitas manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama untuk mengukur capaian pembangunan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Di Indonesia, IPM digunakan sebagai indikator resmi dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah yang dikeluarkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (BPS, 2024). IPM tidak hanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang dipilah antara laki-laki dan perempuan di semua dimensi pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG dihitung berdasarkan rasio antara IPM perempuan dan

IPM laki-laki (BPS, 2024). Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan. Sebaliknya, semakin jauh dari 100, maka semakin besar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses pembangunan (BPS, 2024).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik (BPS, 2024). Ukuran ini untuk menilai posisi strategis perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai anggota DPR/DPRD, jabatan manajerial, serta kontribusi ekonomi KemenPPPA, 2024). Rendahnya IDG menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih terbatas.

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Arniti, 2020); Partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah (Nelson & Huntington, 1994). Partisipasi politik merupakan indikator penting dalam kualitas demokrasi. Semakin tinggi partisipasi warga negara, semakin representatif sistem politik yang terbentuk. Rendahnya partisipasi politik perempuan disebabkan hambatan struktural dan kultural yang membatasi keterlibatan perempuan di ruang publik (Puspasari et al., 2020); dan rendahnya pendidikan politik (Kimbal, 2018).

Partisipasi politik merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik yang menunjukkan keterlibatan warga negara dalam proses politik untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik. Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik menjadi indikator penting karena mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan arah pembangunan dan kebijakan negara. Menurut Budiharjo (Arniti, 2020), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara maupun memengaruhi kebijakan pemerintah. Nelson & Huntington (1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik secara individual maupun kolektif. Sementara itu, (Nurhadi & Padjadjaran, 2020) menjelaskan bahwa partisipasi politik mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye politik, bergabung dengan partai politik, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, hingga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. Partisipasi politik memiliki fungsi sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat, mekanisme kontrol terhadap pemerintah, serta sumber legitimasi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, semakin luas partisipasi warga negara, semakin tinggi kualitas demokrasi yang berkembang dalam suatu negara.

Partisipasi politik perempuan merupakan bagian dari prinsip demokrasi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Hak perempuan untuk memilih, dipilih, serta menduduki jabatan publik dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Meskipun memiliki hak yang sama, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam dunia politik. Budaya patriarki merupakan faktor utama yang membatasi akses perempuan terhadap jabatan politik. (Ramadhani & Rahmawati, 2020). Selain itu, rendahnya sumber daya ekonomi, pendidikan politik, jaringan politik, dan stereotip gender turut memengaruhi peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik (Taufik, 2018). (Beckwith & Cowell-Meyers, 2007) menyatakan bahwa ketimpangan representasi perempuan mendorong banyak negara menerapkan kebijakan afirmatif melalui sistem kuota perempuan. Namun demikian, peningkatan jumlah perempuan di lembaga politik belum tentu diikuti oleh meningkatnya kemampuan mereka dalam memengaruhi kebijakan publik. Dengan kata lain, representasi perempuan tidak cukup diukur secara kuantitatif, tetapi juga secara substantif. Pandangan ini juga diperkuat oleh berbagai kajian di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kuota masih dipengaruhi oleh proses rekrutmen partai, budaya politik, dan dukungan institusional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pembangunan manusia dan pemberdayaan gender di Provinsi Lampung melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah terkait, serta publikasi UNDP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan dan publikasi resmi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan menggambarkan perkembangan IPM, IPG, dan IDG di Provinsi Lampung serta membandingkannya dengan rata-rata nasional untuk melihat kesenjangan pembangunan dan pemberdayaan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pembangunan Manusia



Grafik 2 IPM Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Lampung, 2020-2023

Sumber: BPS 2020-2024.

Keterangan: $IPM \geq 80$ kategori tinggi; $70 \leq IPM < 80$ kategori sedang; $60 \leq IPM < 70$, kategori rendah; $IPM < 60$. Dari tabel 1, IPM laki-laki tahun 2020 sebesar 73,72, sedangkan perempuan 66,59.

Dalam 5 tahun terakhir yaitu 2024, IPM laki-laki meningkat menjadi 74,62, sedangkan IPM perempuan mencapai 70,15.

14

Tabel 1 Komponen Penyusun IPM di Provinsi Lampung 2020-2024

Tahun	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Sekolah (tahun)		Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah/tahun)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2020	68,78	72,61	12,54	12,88	8,36	7,73	14,268	7,720
2021	68,86	72,69	12,64	12,95	8,39	7,76	14,308	7,778
2022	69,07	72,97	12,65	12,98	8,47	7,87	14,7222	7,999
2023	71,77	76,69	12,68	13,01	8,57	8,00	15,288	8,283
2024	69,56	73,54	12,69	13,02	7,92	8,05	15,238	8,813

Sumber: BPS 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia pada tiga aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Untuk mengukur aspek kesehatan digunakan komponen Angka Harapan Hidup (AHH), ukuran pendidikan menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan aspek standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita.

Dalam lima tahun terakhir, indikator kesehatan di Provinsi Lampung perlu dicermati dengan baik. Angka harapan hidup laki-laki menunjukkan tren fluktuatif penurunan dari tahun ke tahun (68,78 pada tahun 2020, meningkat ke 68,86 tahun 2021, naik tahun 2022 menjadi 69,07, menjadi 71,77 tahun 2023, tetapi menurun ke 69,56). Usia harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi dari laki-laki dari tahun 2020 sebesar 72,61 naik ke 72,69 (tahun 2021), naik lagi 72,97 tahun 2022, naik lagi 76,69 ke tahun 2023 tetapi menurun tajam tahun 2024 ke 73,54. Data ini menyisakan pertanyaan penting: mengapa pada tahun 2024 angka harapan hidup laki-laki dan perempuan menurun?

Pada sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) laki-laki tahun 2020 sebesar 12,54, sedangkan perempuan lebih tinggi (12,88); HLS laki-laki tahun 2021 meningkat 12,64 sedangkan perempuan meningkat lagi 12,95; pada tahun 2023 HLS laki-laki naik 12,65, sedangkan perempuan naik ke 12,98. Pada tahun 2023 HLS laki-laki menjadi 12,68, sedangkan perempuan menjadi 13,01; tahun 2024 HLS laki-laki 12,69, sedangkan perempuan meningkat lagi ke 13,02.

Sumberdaya manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki hak sama untuk berkualitas. Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk berkualitas secara setara dan unggul dalam pendidikan. Tetapi realitasnya rata-rata lama sekolah laki-laki jauh lebih tinggi. Pada tahun 2020, RLS laki-laki sebesar 8,36 tetapi perempuan hanya 7,73; tahun 2021 RLS laki-laki naik menjadi 8,39 sedangkan RLS perempuan 7,76 (masih di bawah RLS laki-laki); RLS laki-laki tahun 2022 sebesar 8,47 dan perempuan 7,87; RLS laki-laki tahun 2023 menjadi 8,57 dan perempuan 8,00; tahun 2024 RLS laki-laki 7,92 dan perempuan 8,05 tahun. Terkait rata-rata lama sekolah, pada tahun 2024 RLS laki-laki menunjukkan penurunan yang signifikan sedangkan perempuan 8,05. Fenomena ini penting untuk dipahami karena idealnya laki-laki dan perempuan semakin setara dalam kualitas.

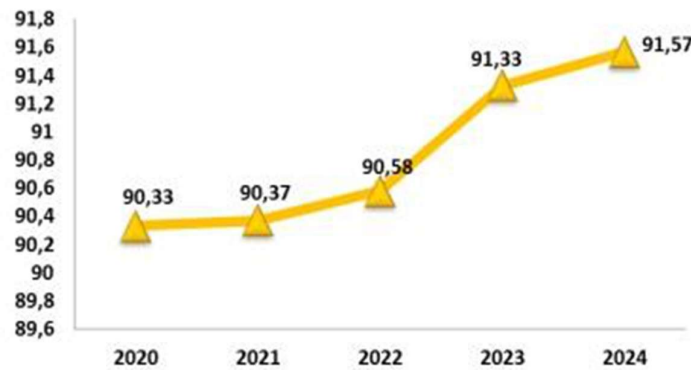
Satu lagi indikator yang menunjukkan kualitas sumberdaya manusia adalah pengeluaran perkapita. Data menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, pengeluaran per kapita perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita perempuan tercatat sebesar 8,135 sedangkan laki-laki mencapai Rp15.238 per tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan ekonomi. Perempuan lebih miskin dari laki-laki, atau lebih hemat, atau mengalami diskriminasi. Kemungkinan, ada perbedaan tingkat pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, serta kesenjangan upah berdasarkan jenis kelamin.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Instrumen ini bermanfaat untuk menunjukkan kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Komponen dalam menyusun instrumen ini sama dengan komponen IPM hanya saja diperbandingan capaian IPM laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berada skala 0 hingga 100. Semakin mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Penyusunan IPG bermanfaat dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan. Instrumen ini bagus untuk mengukur kesenjangan pembangunan bagi laki-laki dan perempuan, terutama pada tiga aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (standart hidup layak). Penyusunan IPG memberikan kejelasan bagi pemerintah dan stakeholders tentang gambaran kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah untuk menyusun kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. IPG juga menjadi alat untuk memantau perkembangan kesetaraan gender secara periodik, mengevaluasi efektivitas program pembangunan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Penyusunan IPG dapat membantu memastikan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung sebesar 91,33 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pembangunan telah setara gender, sebesar 91,33% tetapi masih ada kesenjangan sebesar 8,67 %. Nilai IPG 100 bermakna tidak ada kesenjangan, mendekati 100 menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Provinsi Lampung relatif tidak terlalu lebar, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan, dan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPG, semakin besar ketimpangan gender dalam pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2020). Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung meningkat dari tahun ke tahun, hingga 73,13 pada tahun 2024. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pembangunan manusia mengalami perbaikan dan beradapada jenjang tinggi.

Pada tahun 2024, IPG Provinsi Lampung mencapai 91,57, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 91,33. Meskipun mengalami peningkatan, perkembangan IPG selama periode 2020–2024 masih menunjukkan pola yang berfluktuasi. Nilai terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 90,33. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada beberapa indikator penyusun IPG, khususnya harapan lama sekolah serta indikator ekonomi perempuan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meskipun pembangunan manusia perempuan di Provinsi Lampung terus meningkat, kesenjangan gender, terutama pada aspek ekonomi, masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan.



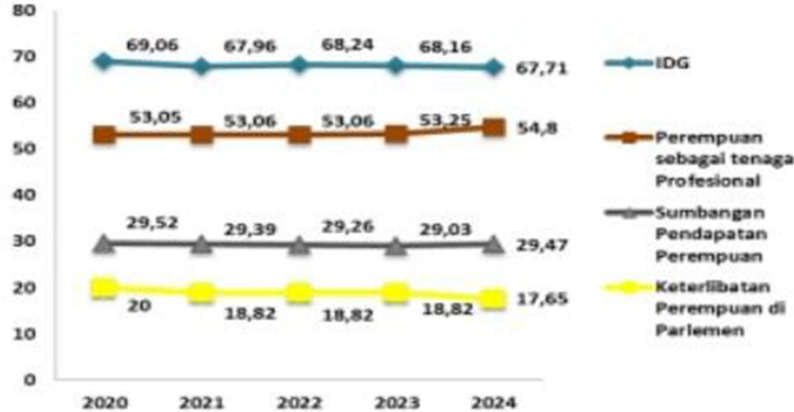
Grafik 3 Perkembangan IPG di Provinsi Lampung 2020-2024

Sumber: BPS 2020-2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan instrumen untuk mengadopsi konsep Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). IDG disusun dari komponen keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi, dan manajer, serta kontribusi dalam pendapatan. Melalui ketiga indikator dapat dideskripsikan tingkat keberdayaan perempuan. Instrumen IDG berbeda dengan IPG karena IPG fokus pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Sedangkan IDG menilai sejauh mana perempuan memiliki kesempatan, akses, dan peran dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi. Dengan demikian, IDG tidak hanya menggambarkan hasil pembangunan yang dicapai perempuan, tetapi juga mengukur tingkat keberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam menentukan arah dan proses pembangunan.

Peran strategis perempuan dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga sangat penting karena perempuan dinilai paling memahami kebutuhannya yang spesifik gender. Menurut Karyono, Tusianti, dan Clarissa (2019), perempuan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perannya dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tanggung jawab dalam pengasuhan anak, pendidikan keluarga, dan pemeliharaan kesehatan masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan sebagai akibat dari konstruksi sosial dan budaya yang berkembang. Sehingga, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan serta anggaran akan memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi kesejahteraan perempuan itu sendiri, tetapi juga terhadap kualitas sumber daya manusia serta keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.



Grafik 4. IDG dan Komponen IDG di Provinsi Lampung, 2020-2024

Sumber: BPS 2020-2024

Mulyaningsih

(Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Gender di Provinsi Lampung: Analisis IPM, IPG & IDG)

IDG Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020-2024 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020, IDG Provinsi Lampung mencapai 69,06. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2020-2024 dan peningkatan kembali pada tahun 2022. Hingga akhirnya pada tahun 2024 angka IDG Provinsi Lampung mencapai 67,71. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan di wilayah Lampung memiliki tingkat pemberdayaan yang cukup baik.

Deskripsi persentase keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2020 sebesar 20 persen. Tahun 2021, angkanya bergerak turun ke 18,82 persen dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2022. Persentasenya sedikit meningkat menjadi 18,82 persen pada tahun 2023, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 17,65 persen. Meskipun belum mencapai target ideal sebesar 30 persen, tren tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif

Penurunan kuantitas perempuan di lembaga legislatif di antaranya karena problem Pergantian Antarwaktu (PAW) di DPRD Provinsi Lampung. Pergantian itu secara regulasi disebabkan karena ada meninggal dunia, atau faktor lain yang menyebabkan anggota DPRD harus diganti. Namun, dalam hal ini walaupun ada problem yang berakibat pada PAW realitas menunjukkan yang diganti perempuan dan penggantinya laki-laki. Negara yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dalam penyelenggaraan demokrasi karena mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui partisipasi politik, warga negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi proses perumusan kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintahan. .

Menurut Budiardjo (2008), partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik melalui pemilihan umum maupun upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Sejalan dengan itu, (Nelson & Huntington, 1994) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah; dan untuk memperkuat kualitas demokrasi (Parwati & Istiningdiah, 2021).

Meskipun hak politik dijamin secara konstitusional, tingkat partisipasi politik setiap kelompok masyarakat tidak selalu sama. Perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi secara optimal di bidang politik. Namun generasi Z semakin menerima kehadiran perempuan dalam dunia politik (Setiawan & Jakfar, 2023), Meskipun masih terdapat pandangan yang meragukan kapasitas perempuan sebagai pemimpin (Nadyawati, 2025). Kondisi tersebut dipengaruhi kultur patriarki, stereotip gender, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, rendahnya pendidikan politik, serta terbatasnya kesempatan perempuan menduduki posisi strategis dalam partai politik (Fajri, 2023, Herianto & Wijanarko, 2022) 2017); perempuan perlu diajak berpolitik (Nadyawati, 2025).

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik menerapkan *quotq* minimal 30% dalam kepengurusan dan pencalonan anggota legislatif. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif secara nasional maupun daerah masih belum mencapai target yang diharapkan (Cahyowirawan et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kuota pada tahap pencalonan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota legislatif. Di Provinsi Lampung, partisipasi perempuan dalam politik mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2024), proporsi perempuan sebagai anggota legislatif pada tahun 2023 mencapai 18,82 persen tetapi pada pemilu tahun 2024, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung hanya mencapai 15,3% (18 orang dari total 85 kursi).

Urgensi peningkatan partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung semakin besar apabila dikaitkan dengan berbagai persoalan pembangunan yang masih berdampak langsung terhadap perempuan dan anak. Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan berupa tingginya angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tingginya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Berbagai

persoalan tersebut memerlukan kebijakan publik yang komprehensif, responsif gender, dan berpihak pada kelompok rentan (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2024; Kementerian Kesehatan RI, 2024; Komnas Perempuan, 2024; BP2MI, 2024). Kehadiran perempuan dalam lembaga politik diharapkan mampu memperkuat fungsi representasi substantif melalui penyusunan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Tabel Perbandingan IPM, IPG, dan IDG Provinsi Lampung vs Indonesia

Indeks	Indonesia	Provinsi Lampung	Keterangan
IPM	75,02 (2024)	73,12 (2024)	Lampung masih di bawah rata-rata nasional, namun terus meningkat setiap tahun
IPG	+ 91,5 (2023)	91,33 (2023)	Lampung relatif setara dengan nasional, menunjukkan kesenjangan gender tidak terlalu besar
IDG	+ 76 – 77 (2023)	+73 (2023)	Lampung lebih rendah dari nasional, menunjukkan keterbatasan perempuan dalam politik & ekonomi

Sumber: diolah kembali dari data BPS 2020-2024

Perbandingan antara IPM, IPG, IDG Provinsi Lampung dan Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Lampung relatif sejalan dengan angka nasional, yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan dan kesehatan tidak terlalu jauh berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pembangunan telah terjangkau secara meluas. Namun demikian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berbeda secara signifikan. Angka rata-rata IDG Lampung lebih rendah dari nasional yang tercermin jumlah perempuan dalam lembaga legislatif serta terbatasnya posisi strategis yang diduduki perempuan di sektor publik maupun ekonomi. Secara umum, perbandingan ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan akses pembangunan (IPM dan IPG) dengan tingkat pemberdayaan perempuan (IDG). Jadi, meskipun perempuan di Lampung telah memperoleh akses yang relatif setara dalam pembangunan dasar, tetapi keterlibatan dalam pengambilan keputusan politik masih menjadi tantangan utama.

Baik Indonesia maupun Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada seluruh indikator, yaitu IPM, IPG, dan IDG selama periode 2015–2024. IPM menunjukkan peningkatan yang konsisten yang mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara itu, IPG menunjukkan nilai yang relatif stabil dan mendekati 100, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan gender dalam akses pembangunan dasar semakin kecil. Namun demikian, IDG menunjukkan peningkatan yang lebih lambat dibandingkan IPM dan IPG, yang menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi masih terbatas.

Kondisi di Provinsi Lampung menunjukkan pola yang serupa dengan nasional, namun dengan nilai yang sedikit lebih rendah, terutama pada IPM dan IDG. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kemajuan pembangunan, pemberdayaan perempuan dalam ruang politik masih menjadi tantangan utama. Berbeda dengan IPM dan IPG, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan nilai yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perempuan telah memiliki akses yang relatif setara dalam pendidikan dan kesehatan, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama di ranah politik dan ekonomi, masih terbatas. Rendahnya IDG mencerminkan bahwa perempuan belum sepenuhnya memiliki posisi strategis dalam lembaga legislatif, jabatan manajerial, maupun penguasaan sumber daya ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Lampung menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan IPM dan IPG. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perempuan telah memperoleh akses yang relatif setara dalam pendidikan dan kesehatan, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan politik masih terbatas (BPS, 2019; KemenPPPA, 2024). Rendahnya IDG mencerminkan masih minimnya representasi perempuan dalam posisi

strategis seperti lembaga legislatif, jabatan manajerial, dan sektor ekonomi formal. Namun, secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan tingkat pemberdayaan politik dan ekonominya. Dengan kata lain, terdapat variabel yang secara tidak langsung berkontribusi pada pendidikan, kesehatan, ekonomi. Peningkatan ketiga variabel tersebut Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian mengenai partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung, karena peningkatan IPM dan IPG belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan IDG. Dengan demikian, meskipun pembangunan manusia dan kesetaraan akses telah membaik, pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan politik masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah.

Masalah struktural dan kultural merupakan menghambat pembangunan sumberdaya manusia. Pemerintah perlu memiliki political will untuk mendekonstruksi sistem, perspektif, dan analisis gender para decision maker dan dan pelaksana program. Perspektif yang tidak setara gender akan menghasilkan kebijakan yang bias gender dan karenanya merugikan perempuan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Lampung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa IPM Provinsi Lampung lebih rendah dari nasional. Kesenjangan gender dalam akses dasar semakin meningkat, tetapi IDG Lampung lebih kecil dari nasional, yang bermakna bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik dan ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan daerah (KemenPPPA, 2024).

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Secara struktural, keterbatasan akses perempuan terhadap posisi strategis masih dipengaruhi oleh sistem rekrutmen politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif (Krook, 2009). Secara kultural, nilai-nilai patriarki dan stereotip gender masih memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kapasitas perempuan dalam kepemimpinan (Fakih, 2008). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang sensitif gender untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Provinsi Lampung.

Fenomena lain yang menarik dalam perkembangan politik lokal adalah munculnya politik dinasti. Dalam konteks Indonesia, hubungan kekerabatan sering kali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses rekrutmen politik dan peluang seseorang memperoleh jabatan publik (Putri et al., 2021). Politik dinasti berkembang melalui pemanfaatan jaringan keluarga untuk mempertahankan kekuasaan politik (Prayitno et al., 2021). Hubungan patronase, klientelisme, dan jaringan keluarga masih menjadi karakteristik penting dalam politik lokal Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberhasilan perempuan memasuki arena politik didukung oleh kapasitas dan kompetensi pribadi atau justru dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dengan elite politik. Oleh karena itu, kajian mengenai profil perempuan dalam politik, khususnya yang memiliki latar belakang politik dinasti, menjadi penting untuk memahami pola rekrutmen politik perempuan di tingkat daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai profil perempuan dalam politik di Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan latar belakang kekeluargaan atau politik dinasti, menjadi penting untuk dilakukan. Bagaimana implikasi keberadaan perempuan dalam lembaga politik di Provinsi Lampung terhadap representasi kepentingan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya pada isu kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, ketenagakerjaan, serta pembangunan yang responsif gender.

Diskusi

Analisis relasional terhadap capaian pembangunan di Provinsi Lampung menyingkap adanya ketimpangan antardimensi yang nyata [GoodStats]. Meskipun indikator makro IPM Lampung (73,13) belum mampu melampaui rerata nasional (75,02), daerah ini menorehkan catatan positif pada pemenuhan hak-hak dasar melalui angka IPG yang kompetitif sebesar 91,33 [GoodStats]. Kemiripan nilai IPG ini dengan standar nasional membuktikan keberhasilan pemerintah daerah dalam meratakan distribusi akses sekaligus kemanfaatan pembangunan fundamental, khususnya bagi kelompok perempuan (Sulistiani, 2019). Kendati demikian, modal kapasitas individu perempuan yang setara di bidang kesehatan dan pendidikan tersebut terbentur oleh sempitnya ruang aktualisasi diri, sebagaimana tecermin dari rendahnya performa IDG Lampung di angka 67,71. Anomali berupa tingginya IPG yang diikuti anjloknya IDG mengonfirmasi bertahannya dinding

kultural berupa sistem patriarki yang membatasi posisi tawar strategis perempuan di ruang publik (Fakih, 2008). Perempuan di Lampung jamak menempati posisi pasif akibat minimnya hak kontrol atas pos pendapatan mandiri serta keterwakilan di lembaga politik legislatif. Ketertinggalan dimensi IDG ini pada akhirnya menegaskan bahwa agenda pembangunan wilayah belum sepenuhnya inklusif dalam mendudukkan perempuan sebagai subjek penggerak yang mandiri (Nation, 2025).

Melalui potret Tri-Indeks tersebut, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung sedang menghadapi tantangan struktural berupa fenomena "perempuan pintar yang belum berdaya secara politik dan ekonomi". Kesenjangan pengeluaran per kapita mandiri serta minimnya keterwakilan perempuan di sektor formal bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan manifestasi nyata dari ketimpangan tata nilai gender yang melembaga (Fakih, 2008). Kondisi ini menempatkan dimensi pemberdayaan sebagai titik lemah (*the weakest link*) utama yang menahan laju keadilan gender di daerah. Selama disparitas ruang agensi ini dibiarkan lebar, pertumbuhan IPM makro di Lampung akan selalu dibayangi oleh risiko pemiskinan berwajah perempuan (*feminization of poverty*) pada kelompok rentan. Hal ini membuktikan kegagalan daerah dalam menjamin pilar kontrol pembangunan secara berimbang (Sulistiani, 2019), 2019), sekaligus menjauhkan Lampung dari komitmen pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (Nation, 2025).

Guna menjembatani jurang pemisah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung harus menggeser orientasi kebijakannya secara radikal melalui reformasi tata kelola berbasis gender. Pertama, penguatan aspek kontrol harus dimulai dengan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang ketat melalui kewajiban penyusunan Gender Budget Statement (GBS) di setiap dinas teknis sebagaimana direkomendasikan (Sulistiani, 2019). Kedua, untuk meruntuhkan dinding patriarki di sektor publik, pemerintah daerah wajib memberlakukan kebijakan afirmasi hukum secara konsisten demi memenuhi kuota keterwakilan perempuan di parlemen serta membuka keran promosi jabatan manajerial bagi perempuan di birokrasi dan BUMD (Fakih, 2008). Terakhir, kemandirian finansial perempuan harus didorong melalui intervensi hulu seperti pelatihan vokasi digitalisasi UMKM rumahan dan perluasan akses kredit mikro tanpa agunan khusus perempuan. Rangkaian langkah afirmatif ini menjadi syarat mutlak agar perempuan di Lampung tidak lagi sekadar menjadi objek pasif, melainkan subjek aktif yang menggerakkan roda perekonomian inklusif (Nation, 2025).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa capaian pembangunan di Provinsi Lampung menunjukkan adanya ketimpangan antardimensi pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung masih rendah dibanding angka nasional, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa perempuan telah memperoleh akses yang semakin setara dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Namun, keberhasilan tersebut belum sesuai dengan aspek pemberdayaan, sebagaimana tercermin dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif rendah.

Kesenjangan antara IPG dan IDG menunjukkan bahwa kesetaraan dalam memperoleh manfaat pembangunan belum sepenuhnya diiringi oleh kesetaraan dalam akses kontrol, penguasaan sumber daya ekonomi, dan keterlibatan di ranah publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung masih menghadapi hambatan struktural yang memengaruhi pemberdayaan perempuan, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kapasitas agensi dan kemandirian.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Lampung tidak hanya memerlukan perbaikan pada aspek pembangunan manusia, tetapi juga penguatan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan gender. Optimalisasi Anggaran Responsif Gender (ARG), peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta perluasan akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi merupakan langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Dengan demikian, pembangunan yang inklusif, berkeadilan gender, dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih optimal di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislative Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(39), 329–348.

- Beckwith, K., & Cowell-Meyers, K. (2007). Sheer numbers: Critical representation thresholds and women's political representation. *Perspectives on Politics*, 5(3), 553–565. <https://doi.org/10.1017/S153759270707154X>.
- Fajri. (2023). Dominasi Politik Identitas dalam Kontestasi Politik Indonesia serta Mitigasinya Jelang Pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(2), 1–14.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>
- Kimbal, M. (2018). Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan Desa di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Sosiohumaniora*, 20(3), 282. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3>.
- Nadyawati, L. (2025). Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 220–232.
- United Nation. (2025). *The Sustainable Development Goals Report*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2025.pdf>
- Nelson, J., & Huntington, S. P. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Kota: Rineka Cipta.
- Nurhadi, W. (2020). Gelombang demokratisasi ketiga (Review Essay). Dapat diakses pada https://www.researchgate.net/publication/343360577_GELOMBANG_DEMOKRATISASI_KETIGA
- Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2021). Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 119–129. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.119-129>
- Puspasari, H. W., Pawitaningtyas, I., & 앤드류. (2020). Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981>
- Ramadhani, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *ISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/7237/4298>
- Setiawan, H. D., & Jakfar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Sulistiani, D. (2019). Pendampingan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. *Egalita*, 13(1), 14–23. <https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8075>
- Taufik, M. (2018). Faktor Penghambat Keterwakilan Calon Legislatif Perempuan: Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 24–30.